

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYELENGGARAAN
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat

Sarjana S-1 Administrasi Publik



Diajukan Oleh :

IREN PUTRI RAMADANI

NIM. 07011282126108

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYELENGGARAAN
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALEMBANG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh:

**IREN PUTRI RAMADANI
07011282126108**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 7 Maret 2025

Pembimbing

**Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005**



**Mengetahui,
Ketua Jurusan**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“EVALUASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG”

Skripsi
Oleh :

Putri Kurnia
07011282126085

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 14 Maret 2025

Pembimbing :

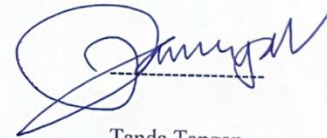
1. Januar Eko Aryansah, S.IP., S.H., M.Si
NIP.198801272019031005

Penguji :

1. Lisa Mandasari, S.IP., M.Si
NIP.198603272023212029

2. Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si
NIP.198902222023212044

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP: 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP: 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iren Putri Ramadani

NIM : 07011282126108

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Program Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 10 Maret 2025



Iren Putri Ramadani
NIM. 07011282126108

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“it's fine to fake it till you make it till you do till it's true”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Diri saya sendiri
2. Keluarga, terkhusus Orang tua saya
3. Orang-orang yang saya sayangi
4. Seluruh dosen dan pegawai FISIP UNSRI
5. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2021
6. Almamater kuning Universitas Sriwijaya

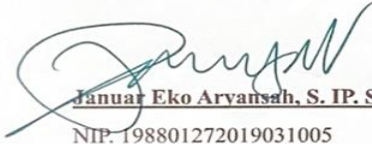
ABSTRAK

ABSTRAK

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengimplementasikan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Penelitian ini menganalisis implementasi IKD di Kota Palembang menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel utama. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan IKD memiliki dasar hukum yang jelas, penerapannya masih menghadapi kendala seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan perangkat pendukung, serta gangguan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Tingkat aktivasi IKD di Kota Palembang masih rendah, hanya 2,14% dari total penduduk wajib KTP. Kesimpulannya, implementasi IKD memerlukan peningkatan dalam sosialisasi, infrastruktur teknis, dan koordinasi antar instansi agar lebih optimal.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Identitas Kependudukan Digital, Administrasi publik, Disdukcapil Kota Palembang.

Pembimbing



Januar Eko Arvansah, S. IP. SH., M. Si
NIP. 198801272019031005

Indralaya, † Maret 2025
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.sos., MPA.

NIP. 1969111019940110

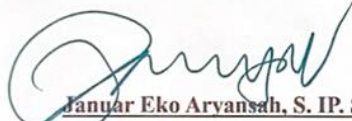
ABSTRACT

ABSTRACT

The Palembang City Government, through the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil), has implemented the Digital Population Identity (IKD) program in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 72 of 2022. This study analyzes the implementation of IKD in Palembang using Van Meter and Van Horn's implementation theory, which includes six key variables. A qualitative descriptive method was used, with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that although the IKD policy has a clear legal basis, its implementation faces several challenges, including limited public awareness, insufficient supporting devices, and frequent disruptions in the Population Administration Information System (SIAK). The activation rate of IKD in Palembang remains low at only 2.14% of the total eligible population. In conclusion, improving socialization efforts, technical infrastructure, and inter-agency coordination is crucial for optimizing IKD implementation.

Keywords: Policy implementation, Digital Population Identity, Public administration, Disdukcapil Palembang.

Pembimbing



Januar Eko Arvansah, S. IP. SH., M. Si
NIP. 198801272019031005

Indralaya, 7 Maret 2025

Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budivanto, S.sos., MPA.

NIP. 1969111019940110

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi dengan judul “Implementasi Program Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang” dengan baik tanpa halangan tertentu guna menyelesaikan studi di jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

Penyusunan Skripsi ini tidaklah lepas dari bimbingan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, berkat izin, karunias, dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik pada titik ini.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Erwin dan Ibu Tika yang selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk dan doa meraka yang tidak henti untuk kelancaran studi penulis.
3. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si selaku dosen pembimbing yang sudah membantu penulis dalam penyusunan skripsi
4. Rektor Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si.
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
6. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S. Sos., MPA.
7. Seluruh Dosen, Pimpinan, Staf, dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Putri Kurnia, Natasya, Khoirunisa Muflikhani Munir selaku teman penulis yang selalu memberikan dukungan serta masukan selama proses penyusunan skripsi.
9. Dito Alehandro selaku *support system* penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran membangun yang diberikan sangat diharapkan untuk mencapai kesempurnaan dalam skripsi ini.

Palembang, 15 Maret 2025

Iren Putri Ramadani

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
LERMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang.....	14
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teori	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Implementasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Kebijakan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Identitas Kependudukan Digital	Error! Bookmark not defined.
2.2 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kerangka Bepikir Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Definisi Konsep	Error! Bookmark not defined.
3.3 Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.4 Jenis dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Data Primer.....	Error! Bookmark not defined.

3.4.2	Data Sekunder.....	Error! Bookmark not defined.
3.5	Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.6	Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.6.1	Wawancara.....	Error! Bookmark not defined.
3.6.2	Observasi	Error! Bookmark not defined.
3.6.3	Dokumentasi	Error! Bookmark not defined.
3.7	Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.8	Jadwal Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1	Deskripsi Wilayah Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.2	Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.3	Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1	Standar dan Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
4.3.2	Sumberdaya.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.3	Komunikasi Antar Organisasi	Error! Bookmark not defined.
4.3.4	Karakteristik Agen Pelaksana	Error! Bookmark not defined.
4.3.5	Kecenderungan (disposisi) Pelaksana	Error! Bookmark not defined.
4.3.6	Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik	Error! Bookmark not defined.
4.4	Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
5.1	Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
	DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
	LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan Aplikasi IKD	17
Gambar 2 Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3 Model Analisis Data Interaktif.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4 Struktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5 Kepala Bidang Dafduk sedang melakukan pelayanan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6 Petugas sedang melakukan aktivasi IKD kepada warga di Loker IKD	Error! Bookmark not defined.
Gambar 7 Loker Prioritas pelayanan untuk lansia dan disabilitas ...	Error! Bookmark not defined.
Gambar 8 Wawancara dengan warga Terkait IKD.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 9 Pamflet Penjelasan, Persyaratan dan tata cara Pembuatan IKD di ruang Pendaftaran Penduduk.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 10 Proses Aktivasi IKD kepada Warga	Error! Bookmark not defined.
Gambar 11 Wawancara dengan Operator SIAK	Error! Bookmark not defined.
Gambar 12 Penjelasan Petugas kepada Masyarakat terkait IKD	Error! Bookmark not defined.
Gambar 13 Wawancara petugas Pendaftaran Penduduk	Error! Bookmark not defined.
Gambar 14 Dokumentasi Wawancara Warga	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Rekapitulasi Registrasi IKD 2023	18
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3 Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4 Informan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5 Matriks Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR SINGKATAN

IKD	: Identitas Kependudukan Digital
KTP-EL	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
DISDUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DITJEN DUKCAPIL	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2022 Error! Bookmark not defined.

Lampiran 2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi Error! Bookmark not defined.

Lampiran 3. Kartu Bimbingan Seminar Proposal Error! Bookmark not defined.

Lampiran 4. Lembar Pengesahan Seminar Proposal Error! Bookmark not defined.

Lampiran 5. Lembar Perbaikan Seminar Proposal..... Error! Bookmark not defined.

Lampiran 6. Lembar Bimbinga Komprehensif..... Error! Bookmark not defined.

Lampiran 7. Surat Izin Penelitian Error! Bookmark not defined.

Lampiran 8. Surat Balasan Izin Penelitian..... Error! Bookmark not defined.

Lampiran 9. Pedoman Wawancara Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi dalam pelayanan publik menjadi salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Prosedur pelayanan publik memerlukan inovasi serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat sebagai respons terhadap pesatnya kemajuan teknologi informasi dan berbagai tantangan yang dihadapi organisasi di sektor publik. Organisasi yang menyediakan layanan publik diwajibkan untuk menciptakan inovasi guna memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat. Inovasi yang dimaksud bisa mencakup percepatan proses layanan, pengembangan program, hingga implementasi digitalisasi sebagai bentuk respons terhadap kemajuan teknologi informasi. Secara filosofis, inovasi menggambarkan keinginan untuk membawa perubahan yang baik melalui pembaruan dan perbaikan. (Yulanda & Frinaldi, 2023)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang adalah instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik serta melaksanakan kebijakan pemerintah. Disdukcapil Palembang juga senantiasa berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tugasnya meliputi pengelolaan urusan otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil, pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan serta pelaksanaan tugas yang dimaksud, serta pengelolaan administrasi dinas. (Aprilia & Wahyudi, 2023:646). Sejalan dengan kemajuan teknologi dan perubahan zaman, Pemerintah Kota Palembang juga mengambil inisiatif untuk memperbaiki pelayanan publik dengan memanfaatkan

teknologi digital. Teknologi ini digunakan untuk memudahkan masyarakat dan petugas untuk mendapatkan layanan kependudukan. Sehingga dokumen administrasi dapat diterbitkan dengan cepat, efektif, dan efisien. Untuk melihat sejauh mana implementasi inovasi ini diterapkan, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan implementasi.

Implementasi dapat berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Horn (Tahir, 2014:55), implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok oleh pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan dari kebijakan. Implementasi menurut Van meter dan Van horn mencakup enam parameter; 1. Standar dan Sasaran Kebijakan 2. Sumberdaya 3. Komunikasi Antar Organisasi 4. Karakteristik Agen Pelaksana 5. Kecenderungan (disposisi) Pelaksana 6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (Syahrudin 2020:41).

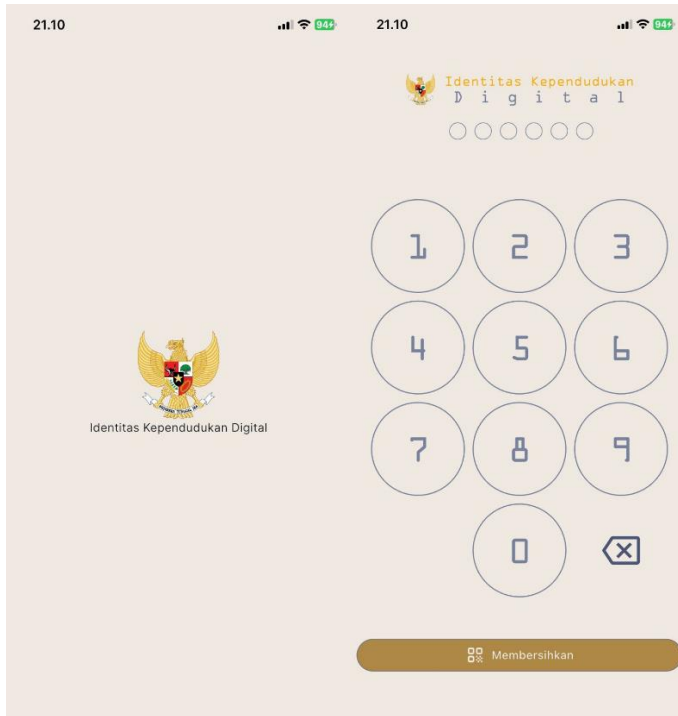
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengimplementasikan inovasi pelayanan KTP elektronik berbasis digital yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022. Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan sebuah inovasi yang muncul akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Faktor utamanya yaitu pertumbuhan internet dan perangkat berbasis internet yang telah tersebar luas di seluruh dunia. IKD diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pelayanan publik (Adillah, 2024:5).

Seiring dengan berjalannya implementasi IKD ini ditemukan beberapa permasalahan pada saat implementasi kebijakan dilaksanakan oleh petugas disdukcapil Kota Palembang yang kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat

terkait identitas kependudukan digital ini. Karena kurangnya sosialisasi dari disdukcapil tentunya menyebabkan masyarakat menjadi kurang memahami fungsi IKD ini sendiri. Peneliti memperoleh informasi dengan melihat langsung saat pelayanan dilakukan di disdukcapil, petugas terkadang hanya melakukan pendaftaran IKD di *handhpone* masyarakat sebagai formalitas dan persyaratan untuk pelayanan tanpa mensosialisasikan apa fungsi dari IKD ini sendiri. Tidak jarang juga masyarakat tidak dapat mendaftar IKD dikarenakan *handphone* yang belum *support* terhadap aplikasi, atau masyarakat memang tidak mempunyai *handphone* jadi tidak bisa mendaftar aplikasi IKD ini. Penyelenggaran identitas kependudukan digital ini juga sering terhambat karena Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) disdukcapil sering kali mengalami *error system*.

Berikut adalah tahapan pembuatan IKD, pertama pengguna harus mendownload aplikasi IKD yang didownload melalui playstore maupun appstore, kedua pengguna memasukkan nomor nik, email serta nomor *handphone*, ketiga verifikasi wajah dan terakhir melakukan aktivasi dengan cara scan barcode aktivasi yang tersedia dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di kelurahan, kecamatan, maupun layanan publik lainnya yang berkaitan dengan administrasi kependudukan (Salsa Bella & Widodo, 2023:19).

Gambar 1 Tampilan Aplikasi IKD



Sumber : Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Apps Store)

IKD sendiri telah disosialisasikan dan dalam tahap uji coba di 58

NO	UPTD	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	DEMANG	2,023	1,674	1,495	1,291	1,881
2	ZONA I	782	654	627	386	486
3	ZONA II	427	369	550	293	423
4	ZONA III	241	229	219	172	325
5	ZONA IV	225	177	170	136	142
6	ZONA V	406	328	352	268	363
7	ZONA VI	379	380	408	454	252
8	ZONA VII	296	289	276	190	348
9	ZONA VIII	642	520	563	719	552
10	ZONA IX	1,042	962	1,046	673	544
SUB TOTAL		6,463	5,582	5,706	4,492	5,316
TOTAL KESELURUHAN				27.559		

Kabupaten/Kota secara bertahap per tahun 2022 lalu. Berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh dari Ditjen Dukcapil pada 22 februari 2024 jumlah aktivasi IKD sebesar 8.186.961 juta pengguna diseluruh indonesia. Sebagai entitas pemerintah yang menjalankan fungsi administratif dalam dokumen administrasi kependudukan warganya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang beroperasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan berkaitan dengan administrasi kependudukan seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen lainnya berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang ada terutama pada layanan KTP-el menjadi IKD (Adillah, 2024:6).

Tabel 1 Data Rekapitulasi Registrasi IKD 2024

*Sumber : Diolah penulis dari Rekapitulasi Pendaftar IKD Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 2024*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pengguna IKD sebanyak 27.559 hanya sebesar 2,14% dari jumlah penduduk wajib KTP Kota Palembang sebanyak 1.284.830 jiwa, sedangkan target nasional sebesar 25%. Maka dapat disimpulkan bahwa aktivasi IKD di Kota Palembang masih rendah.

Rendahnya tingkat aktivasi IKD di Kota Palembang, yang hanya mencapai 2,14% dari total penduduk wajib KTP, mencerminkan adanya hambatan signifikan dalam pelaksanaannya. Kendala ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan perangkat pendukung aplikasi IKD dan minimnya sosialisasi oleh petugas, tetapi juga gangguan teknis pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), yang sering mengalami gangguan sistem. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya aplikasi IKD, sehingga banyak masyarakat yang hanya melihatnya sebagai formalitas administratif semata (Bella & Widodo, 2023).

Kegagalan implementasi program ini dapat menghasilkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah pemborosan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun waktu, karena target nasional aktivasi IKD sebesar 25% tidak dapat tercapai. Selain itu, minimnya adopsi IKD mengakibatkan layanan administrasi publik tetap lambat dan bergantung pada format fisik, yang rawan terhadap kehilangan dan kerusakan dokumen. Dalam jangka panjang, kegagalan ini juga dapat memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena

dianggap tidak mampu menyediakan layanan yang efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Permadi & Rokhman, 2023)

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena IKD merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh Kemendagri melalui Disdukcapil di tiap daerah guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang peneliti melihat implementasi program IKD yang belum dilakukan secara menyeluruh, serta masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi IKD dan jarang mendengar mengenai program IKD. Penelitian ini menjadi krusial karena implementasi IKD dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, menjaga keamanan data, menghemat anggaran, memfasilitasi adaptasi teknologi, dan mengintegrasikan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Penyelenggaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Implementasi Program Penyelenggaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijabarkan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang Implementasi Program Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang serta sebagai bahan pengembangan teoritis ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai media informasi tambahan, sebagai bahan masukan, saran dan pemikiran mengenai Implementasi Program Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. T. (2024). Transformasi Digital Dalam Kebij Akan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Ktp-El) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Universitas Sriwijaya.
- Agung, A. A. P., & Yuesti, A. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Aprilia, R. R. V. ., & Wahyudi, K. E. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Balai Rw Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober, 9(19), 645–650. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8415574>.
- Astuti, W., & Setiawan, I. (2024). Efektivitas Implementasi Migrasi Kartu Tanda Penduduk Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 9(1), 47-60.
- Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14-31.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Desrinelti, 2021. *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Dr. Syahrudin, S. M. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.

- Istikhomah, I., & Indriasari, S. (2024). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten. *Fenomena*, 4(01).
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis. A Methods Source Book*. United States Of America: Sage Publications, Inc, 2014.
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80-88.
- Pertiwi, C. N. (2024). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kota Palembang Skripsi.
- Purnamasari, I., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4761-4775.
- Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14–31. <https://doi.org/10.55542/Saraqopat.V6i1.833>
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69-86.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (1967). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In Alvabeta. Cv.https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_Dan_R_And_D_Prof_Sugiono
- Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi kebijakan identitas kependudukan digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie*, 5(2), 162-180.

- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahyuningsih, S. (2024). Pendekatan Msn Dalam Implementasi Kebijakan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 8(2), 217-227.
- Muadi, S., Mh, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jrp (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/Jrp.2016.6.2.195-224>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.
- Widianis, K., & Sukraaliawan, N. (2024). Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital dalam Mewujudkan Identitas Tunggal Kependudukan: Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. *Locus*, 16(1), 1-17.
- Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(2), 415-426.
- Zafira, S. A. (2024). Implementasi Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).